

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Digitalisasi pada teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Pemerintah terus berupaya meningkatkan berbagai inovasi digital guna mempercepat modernisasi sistem administrasi. Disisi lain belanja pemerintah yang dananya bersumber dari APBN mempunyai nilai yang sangat besar, dan sebagian besar dari belanja tersebut dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini terdapat dampak yang lebih luas terhadap kebijakan pemerintah dalam menerapkan prinsip belanja pemerintah yang berbasis *payment cashless* (Lestariyanto & As, 2024). Salah satu inovasi yang diterapkan dalam mendukung digitalisasi yaitu, pengadaan barang dan jasa berbasis sistem pembayaran digital. Penggunaan metode pembayaran digital di sektor pemerintahan memungkinkan transaksi yang lebih cepat, aman, dan terdokumentasi dengan baik. Penerapan *Digital Payment* juga banyak digunakan oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah secara proaktif berupaya mempercepat digitalisasi dalam sistem pembayaran belanja APBN guna meningkatkan efisiensi dan transparansi (Sihotang, 2022).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) mengembangkan sistem pembayaran digital yaitu DigiPay Satu. DigiPay Satu merupakan sebuah platform *marketplace* sekaligus sistem pembayaran digital yang memungkinkan Satuan Kerja (Satker) dalam pemerintahan untuk melakukan pembelian barang dan jasa secara daring dengan lebih efisien, hal ini telah diatur dalam pearutan Direktur Perbendahraan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui DigiPay Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Layanan ini memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan *Cash Management System* (CMS) Virtual Account untuk mendukung transaksi non-tunai hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan kontrol atas jumlah uang yang digunakan (Biswan & Adiswastika, 2024).

Menurut Putra, (2024) terdapat permasalahan utama dalam proses penerapan sistem ini masih rendahnya minat bendahara satuan kerja (Satker) untuk beralih ke transaksi non-tunai. Hal ini dikarenakan banyak bendahara satuan kerja yang takut dikenakan biaya tambahan oleh vendor atau bank, padahal DigiPay Satu telah dirancang untuk memfasilitasi transaksi tanpa biaya administrasi tambahan. Selain itu, jumlah vendor yang terdaftar dalam DigiPay Satu masih relatif rendah karena kurangnya pemahaman bahwa penggunaan platform ini sebenarnya tidak rumit. Melalui *Digital Payment*, segala pembayaran ataupun transaksi dapat mempermudah kelancaran transaksi serta mempermudah pencatatan dan perencanaan keuangan melalui rekam jejak transaksi (Mubarak et al., 2022).

Dalam konteks implementasi kebijakan tersebut, keberadaan sistem yang andal perlu diimbangi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif agar tujuan penerapan DigiPay Satu dapat tercapai secara optimal. Monitoring dan Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengawasi tingkat pemanfaatan sistem oleh Satuan Kerja, tetapi juga untuk menilai efektivitas pelaksanaan, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul di lapangan, serta merumuskan langkah perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, proses monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat dalam memastikan bahwa implementasi monitoring dan evaluasi DigiPay Satu benar-benar mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penelitian ini berfokus pada monitoring dan evaluasi penggunaan DigiPay Satu oleh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kanwil DJPb Jawa Barat, serta kendala yang muncul dalam implementasi transaksi non-tunai pada pengadaan barang dan jasa. Selain itu, terdapat dorongan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat untuk mengoptimalkan *cashless society* melalui penggunaan Digipay, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan *Cash Management System* (CMS) Virtual Account terhadap transaksi digital yang menjadi faktor penentu dalam penggunaan sistem tersebut. Dari sisi teknis,

kemudahan akses serta kemampuan sistem untuk bertukar data, berkomunikasi, dan menjalankan program secara aman dan otomatis. Meskipun DigiPay Satu menawarkan berbagai manfaat dan kemudahan, masih banyak bendahara yang lebih memilih transaksi tunai dan belum memahami kepraktisan transaksi *cashless*. Sehingga, terdapat kendala dalam proses implementasi di berbagai instansi pemerintah.

Terdapat adanya resistensi terhadap perubahan, di mana banyak satuan kerja masih merasa lebih nyaman menggunakan metode pembayaran tradisional seperti tunai atau transfer secara manual (Ariyanti, 2025). Dari Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat terdapat implementasi yang rendah terkait penggunaan DigiPay Satu di beberapa wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan serta manfaat dalam implementasi DigiPay Satu.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI DIGIPAY SATU DALAM SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUP KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN JAWA BARAT”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana pengimplementasian monitoring dan evaluasi DigiPay Satu dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan implementasi monitoring dan evaluasi DigiPay Satu dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan adalah:

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait digitalisasi sistem pembayaran pemerintahan dan aplikasinya dalam mengelola keuangan negara. Selain itu,

b. Bagi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat dalam meningkatkan pendampingan yang lebih efektif untuk penerapan DigiPay Satu.

c. Bagi Pembaca

Pembaca dapat menambah wawasan dan memahami tantangan serta peluang yang ada dalam implementasi sistem pembayaran digital ini, serta penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin menggali lebih jauh tentang transformasi digital di sektor publik.